

# PERANCANGAN *STANDARD OPERATING PROCEDURE* UNTUK MENYUSUN RPJMD KABUPATEN BANDUNG DENGAN MEMENUHI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DAN ISO 9001:2008 KLAUSUL 7.3 BERDASARKAN METODE *BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT*

<sup>1</sup>Novalino, <sup>2</sup>Sri Widaningrum, <sup>3</sup>Atya Nur Aisha

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri, Telkom University  
<sup>1</sup>novalino.idrus@gmail.com, <sup>2</sup>Swidaningrum@telkomuniversity.ac.id, <sup>3</sup>atyanuraisha@gmail.com

**Abstrak**—Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu rencana pembangunan pemerintah yang dibuat untuk perencanaan selama lima tahun. Badan teknis pemerintahan yang bertanggung jawab membuat rencana pembangunan termasuk RPJMD adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pemerintah telah memiliki kebijakan yang mengatur mengenai tahapan-tahapan untuk menyusun perencanaan pembangunan, termasuk RPJMD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri merupakan panduan umum dalam menyusun perencanaan pembangunan untuk seluruh daerah, salah satunya adalah Kabupaten Bandung. Dalam hal ini, Kabupaten Bandung memiliki beberapa masalah untuk menyusun RPJMD, yaitu tidak adanya pedoman teknis dan ketidakmerataan pekerjaan antar pegawai dalam merancang RPJMD. Hal ini berdampak dengan terjadinya revisi RPJMD Kabupaten Bandung pada periode 2011-2015 pada tahun 2013. Pada penelitian ini akan dibuat *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam menyusun RPJMD Kabupaten Bandung yang memenuhi *requirement* Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 berdasarkan metode *Business Process Improvement* (BPI) untuk meminimasi dan mengeliminasi masalah yang terjadi. Selain Peraturan Menteri Dalam Negeri, SOP yang dibuat memenuhi *requirement* ISO 9001:2008 Klausul 7.3. Peran ISO 9001:2008 Klausul 7.3 dalam menyusun RPJMD adalah memastikan bahwa *output* yang dihasilkan dalam sebuah perancangan dapat sesuai dengan *input requirement* dan *stakeholders requirement*. Metode BPI digunakan untuk memperbaiki bisnis proses yang akan menjadi urutan proses dalam SOP dengan dilakukan analisis aktivitas dan analisis *streamlining*. Penelitian ini menghasilkan model konseptual untuk memperbaiki proses bisnis penyusunan RPJMD.

**Kata kunci:** RPJMD, *Standard Operating Procedure*, Proses Bisnis, *Business Process Improvement*.

## I. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan merupakan suatu hal penting yang digunakan oleh banyak organisasi salah satunya adalah pemerintah. Perencanaan pembangunan merupakan suatu *tools* yang efektif dan memberikan arahan dalam mencapai tujuan dalam periode waktu

tertentu [1]. Secara umum, pembangunan adalah ide yang mewujudkan semua upaya untuk memperbaiki kondisi saat ini secara berkelanjutan dengan melibatkan semua sektor, badan, dan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat [2]. Perencanaan pembangunan dirancang oleh suatu badan teknis yaitu perencanaan pembangunan nasional oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, pemerintah daerah memiliki perencanaan pembangunan yang terdiri dari Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah selama dua puluh tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama lima tahun (RPJMD) dan Tahunan Daerah Kerja Perencanaan selama satu tahun (RKPD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Penelitian ini dilakukan pada penyusunan RPJMD oleh Bappeda Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Program Bappeda Kabupaten Bandung, terdapat beberapa masalah dalam menyusun RPJMD Kabupaten Bandung yang mempengaruhi ketepatan waktu dan keberlanjutan rencana pembangunan di Kabupaten Bandung. Tabel I memberikan penjelasan singkat mengenai faktor dari masalah dan deskripsi untuk setiap faktor masalah yang ada.

TABEL I  
FAKTOR MASALAH DALAM PENYUSUNAN RPJMD

No.	Faktor	Deskripsi
1.	Dokumentasi	Tidak adanya pedoman teknis untuk menyusun RPJMD
2.	Sumber Daya Manusia	Pegawai memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai proses penyusunan RPJMD dan tidak adanya pembagian kerja yang jelas dalam menyusun RPJMD Kabupaten Bandung yang menyebabkan pekerjaan saling <i>overlap</i> .

Tabel I menunjukkan dokumentasi dan sumber daya manusia sebagai faktor masalah untuk menyusun RPJMD di Kabupaten

Bandung. Pertama, tidak ada pedoman teknis untuk menunjukkan langkah-langkah dalam menghasilkan RPJMD untuk memudahkan pegawai dalam melakukan pekerjaan. Hal ini juga akan memengaruhi ketepatan waktu untuk menyelesaikan RPJMD Kabupaten Bandung. Masalah berikutnya adalah sumber daya manusia di Bappeda Kabupaten Bandung yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menyusun RPJMD. Hal ini karena perputaran pegawai dalam lembaga pemerintah yang tidak mempertimbangkan keahlian atau latar belakang pendidikan. Proses rekrutasi yang dilakukan kepada calon pegawai yang tidak memiliki keterampilan manajerial yang diperlukan, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah [3]. Informasi yang dimiliki pegawai terbatas dalam hal menyusun RPJMD, terutama mengenai pemilik proses dalam setiap aktivitas, sehingga adanya ketumpangtindihan pekerjaan antara pegawai.

Salah satu dampak yang terjadi adalah adanya revisi RPJMD 2010-2015 yang terjadi pada tahun 2013 karena pembangunan sebelumnya tidak realistis. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesinambungan dalam menyusun RPJMD setiap periodenya. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengurangi atau menghilangkan semua faktor masalah. Salah satu cara untuk menghilangkan faktor masalah adalah dengan dirancangnya sebuah *Standard Operating Procedure* (SOP). Manfaat SOP dalam penelitian ini pemberian pedoman teknis dan adanya pemilik proses. Pedoman teknis yang diberikan SOP menunjukkan pegawai tentang langkah-langkah untuk melakukan pekerjaan. Salah satu sumber masalah dalam proses adalah metode yang tidak memiliki acuan atau standar [4]. Selain itu, SOP juga menunjukkan pemilik proses untuk menghilangkan keraguan mengenai karyawan yang bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan untuk membuat SOP yang berguna, diperlukan proses bisnis ideal.

Pada penelitian ini digunakan metode *Business Process Improvement* (BPI) untuk membuat proses bisnis yang ideal dan memastikan *output* yang dihasilkan. Proses bisnis yang ideal memiliki kriteria yang efektif, efisien, dan mudah beradaptasi [5]. Selain dibuat dengan memenuhi *requirement* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, SOP juga dibuat dengan memenuhi *requirement* ISO 9001: 2008. Hal ini dilakukan karena Bappeda telah memiliki sertifikasi dari ISO 9001: 2008 untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM). ISO 9001: 2008 adalah satu set standar internasional untuk sistem manajemen mutu untuk mencapai kepuasan pelanggan dan perbaikan terus-menerus [6]. ISO 9001:2008 Klausul 7.3 dalam menyusun RPJMD adalah memastikan bahwa *output* yang dihasilkan dalam sebuah perancangan dapat sesuai dengan *input requirement* dan *stakeholders' requirement*. Penelitian ini menggunakan Klausul 7.3 tentang desain dan pengembangan yang sesuai dengan menghasilkan perencanaan pembangunan RPJMD.

Tabel II menunjukkan contoh perbandingan antara *requirement* ISO 9001: 2008 klausul 7.3.4, 7.3.5 dan 7.3.6 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Pada Tabel II dijelaskan bahwa klausul 7.3.4 tentang tinjauan desain dan pengembangan telah terpenuhi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri oleh forum konsultasi publik, pembahasan dengan SKPD dan DPRD serta Musrenbang. Klausul 7.3.5 mengatur tentang verifikasi untuk desain dan pengembangan juga telah terpenuhi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri oleh verifikasi Renstra SKPD, diskusi dengan DPRD dan konsultasi dengan Gubernur. Namun pada klausul 7.3.6 tentang

validasi tidak dipenuhi oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010. Klausul 7.3.6 mengatur tentang validasi desain dan pengembangan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa *output* mampu untuk memenuhi persyaratan aplikasi atau pemakaian yang dimaksudkan. Dengan demikian, pada penelitian ini akan dirancang SOP untuk menyusun RPJMD Kabupaten Bandung untuk memenuhi *requirements* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan ISO 9001: 2008 Klausul 7.3 berdasarkan metode BPI.

TABEL II  
CONTOH PERBANDINGAN ANTARA ISO 9001:2008 KLAUSUL 7.3 DAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2010

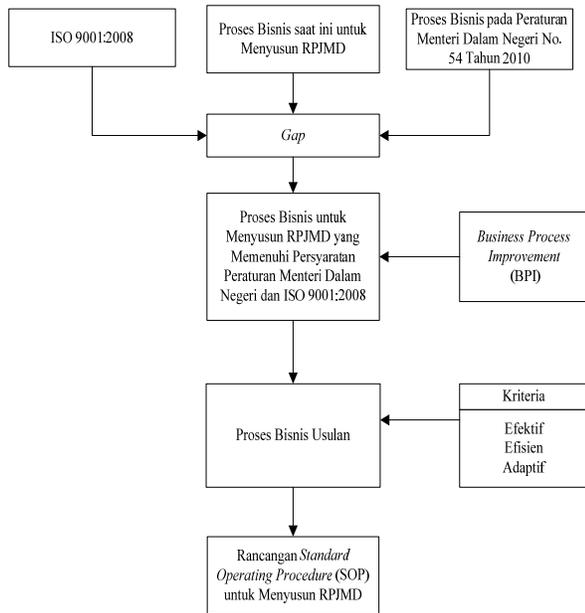
Klausul	ISO 9001:2008	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010
7.3	Desain dan Pengembangan	Penyusunan RPJMD
7.3.4	Tinjauan desain dan pengembangan	a. Konsultasi Publik mengenai rancangan awal RPJMD b. Pembahasan setiap program dengan SKPD c. Musrenbang RPJMD
7.3.5	Verifikasi desain dan pengembangan	a. Verifikasi Renstra SKPD b. Diskusi dengan DPRD mengenai rancangan awal RPJMD c. Konsultasi dengan Gubernur mengenai rancangan akhir RPJMD
7.3.6	Validasi desain dan pengembangan	-

## II. METODE PENELITIAN

### A. Model Konseptual

Model konseptual merupakan representasi visual dari variabel-variabel pada penelitian yang menjadi kerangka konseptual penelitian (Gambar 1). Pada Gambar 1 ditunjukkan bahwa pada awal penelitian, proses bisnis yang ada untuk menyusun RPJMD Kabupaten Bandung akan dibandingkan dengan proses bisnis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 dan *requirement* ISO 9001: 2008 pada deskripsi *gap*. Proses bisnis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 dan *requirement* ISO 9001: 2008 akan diperbaiki dengan *Business Process Improvement* (BPI) sehingga menghasilkan proses bisnis yang efektif, efisien serta adaptif. Tahap berikutnya adalah akan dirancang *Standard Operating Procedure* (SOP) berdasarkan proses bisnis yang telah diperbaiki untuk menyusun RPJMD Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 dan *requirement* ISO 9001: 2008.



Gambar 1 Model konseptual

## B. Sistematika Penyelesaian Masalah

Sistematika Penyelesaian Masalah yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Sistematika penyelesaian masalah akan ditunjukkan pada Gambar 2 mengenai sistematika penyelesaian masalah dalam penelitian ini dari pengumpulan data sampai dengan kesimpulan dan saran.

### 1. Data Primer

Data primer harus dikumpulkan dari sumber atau responden yang memiliki kepentingan dan tanggung jawab dalam organisasi. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari wawancara. Hal ini akan dilakukan untuk mencari data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini, contoh wawancara mengenai permasalahan yang terjadi dan proses bisnis yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder berarti sumber tidak langsung memberikan data kepada peneliti, hal tersebut akan diwakili oleh dokumen [7]. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari struktur organisasi, proses bisnis saat ini, proses bisnis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

### 3. Proses Bisnis yang ada untuk menyusun RPJMD Kabupaten Bandung

Pada langkah ini, proses bisnis yang ada yang dikumpulkan melalui wawancara akan disesuaikan dengan *requirement* ISO 9001:2008 Klausul 7.3 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Langkah ini akan menghasilkan proses bisnis untuk menyusun RPJMD Kabupaten Bandung yang telah memenuhi kedua *requirements* tersebut.

### 4. Proses Bisnis Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan ISO 9001:2008

Pada langkah sebelumnya, akan dihasilkan proses bisnis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan ISO 9001:2008. Proses bisnis ini selanjutnya akan diverifikasi.

### 5. Verifikasi Proses Bisnis

Verifikasi dilakukan untuk mengetahui apakah proses bisnis yang ada sudah memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri dan ISO 9001:2008 atau tidak. Proses bisnis akan diverifikasi oleh *users* dari penelitian ini, yaitu wakil dari Bappeda. Jika proses bisnis telah sesuai bagi *users*, penelitian ini akan dilanjutkan ke langkah berikutnya. Namun, bila proses bisnis belum sesuai, maka akan ditinjau dan diverifikasi kembali.

### 6. Business Process Improvement (BPI)

Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki proses bisnis dengan metode BPI dengan dilakukan *streamlining* pada setiap aktivitas pada proses bisnis, untuk mencapai tujuan organisasi, dan memastikan *stakeholders* mendapatkan *output* yang baik.

### 7. Analisis Aktivitas

Setiap aktivitas pada proses bisnis akan diklasifikasikan menjadi *Real Value Added (RVA)*, *Business Value Added (BVA)*, dan *Non Value Added (NVA)* dari proses bisnis yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan ISO 9001:2008. RVA akan terus dilakukan dalam proses karena diperlukan untuk menghasilkan *output* yang diinginkan dengan kebutuhan *stakeholders*. BVA tidak secara langsung diperlukan untuk menghasilkan *output* yang diinginkan tetapi diperlukan dalam hal bisnis atau penunjang. BVA akan dilakukan *streamlining* dengan menggunakan dua belas *streamlining tools*. NVA akan dihilangkan dari proses karena tidak memberikan *value-added* untuk *output* dan *stakeholders*. Perbaikan dilakukan untuk menghasilkan proses bisnis yang memenuhi kriteria proses bisnis yang baik.

### 8. Streamlining

Pada proses ini akan digunakan dua belas *streamlining tools*, yaitu *bureaucracy elimination*, *duplication elimination*, *value added assessment*, *simplication*, *process cycle time reduction*, *error proofing*, *upgrading*, *simple language*, *standardization*, and *supplier partnerships*, *automtion*, *big picture mapping* yang akan disesuaikan dengan masalah aktivitas.

### 9. Proses Bisnis Usulan Untuk menyusun RPJMD Kabupaten Bandung

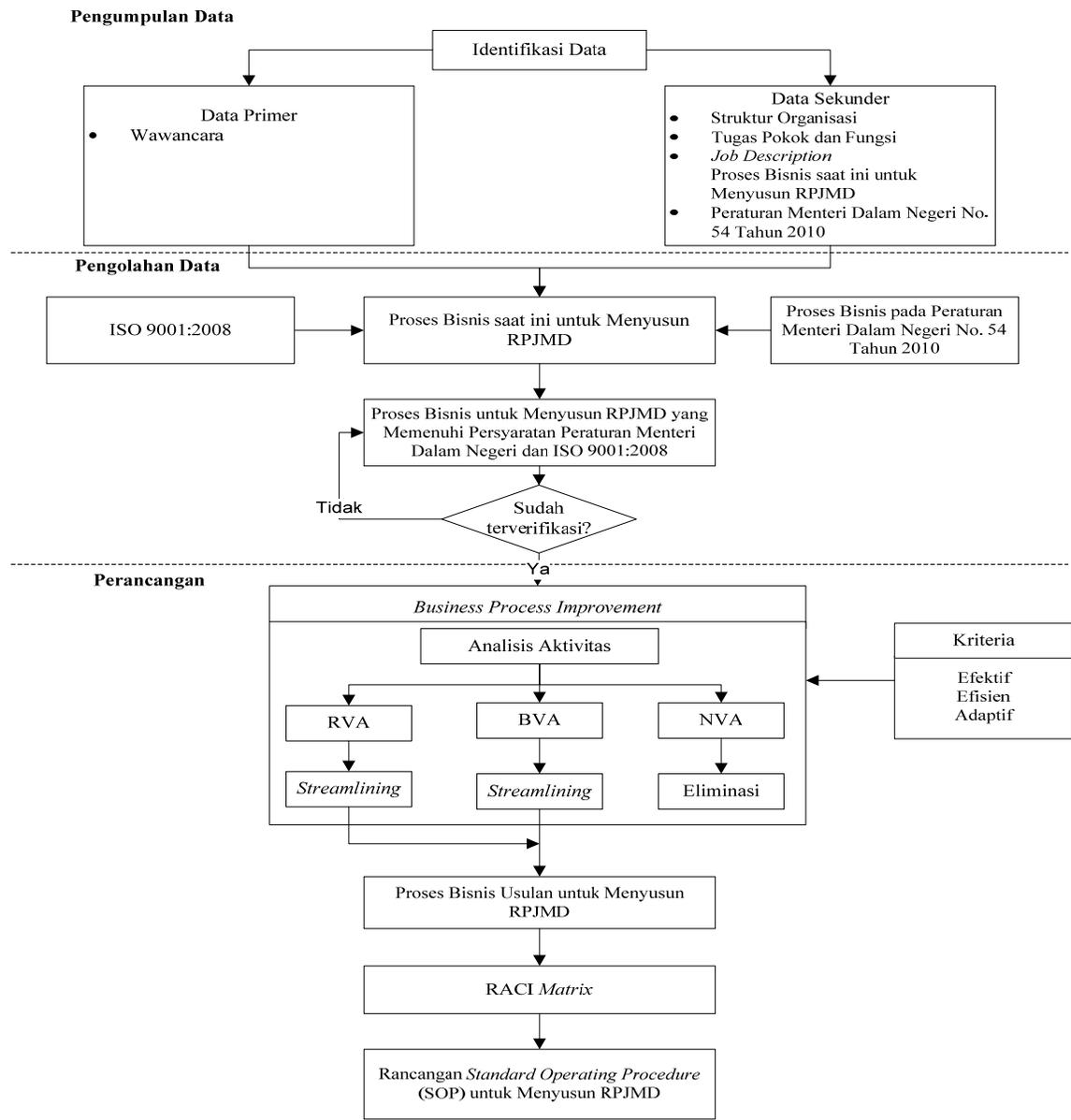
Hasil dari langkah sebelumnya adalah proses bisnis yang diusulkan untuk menyusun RPJMD Kabupaten Bandung, yang telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan ISO 9001:2008 dan telah dilakukan *streamlining*.

### 10. RACI Matrix

RACI Matrix adalah representasi visual dari peran untuk masing-masing aktivitas dengan mengidentifikasi peran yang *Responsible*, *Accountable*, *Consulted*, dan *Informed (RACI)* dari setiap aktivitas.

### 11. Desain Standard Operating Procedure (SOP) untuk menyusun RPJMD Kabupaten Bandung

Proses bisnis usulan selanjutnya akan dijadikan proses bisnis dalam perancangan SOP untuk menyusun RPJMD Kabupaten Bandung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan ISO 9001:2008. SOP ini merupakan *output* dari penelitian yang akan menjadi rekomendasi bagi BAPPEDA.



Gambar 2 Sistem penyelesaian masalah

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang masih berlangsung (*ongoing research*). Pada saat jurnal ini dibuat, penelitian berada pada tahap pengumpulan dan pengolahan data dari proses bisnis yang ada, proses bisnis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan ISO 9001:2008. Setelah tahapan tersebut, akan dilakukan perbaikan proses bisnis dengan metode BPI, yaitu analisis aktivitas dan *streamlining*. Proses bisnis yang telah diperbaiki akan dirancang SOP penyusunan RPJMD dan diverifikasi dengan *users*. Analisis akan dilakukan dari desain SOP yang telah dibuat, yang selanjutnya akan diperoleh kesimpulan dan saran mengenai *output* dan penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Marcellus, I. O. (2009). Development Planning in Nigeria: Reflections on The National Economic Empowerment and Development Strategy (NEEDS) 2003-2007. *Social Science*, 197-210.
- [2] Lawal, T., & Oluwatoyin, A. (2011). National Development in Nigeria: Issues, challenges and prospects. *Public Administration and Policy Research*, 237-241.
- [3] Oviasuyi, P. O., Idada, W., & Isiraojie, L. (2010). Constraints of Local Government Administration in Nigeria. *J Soc Sci*, 81-86.
- [4] Gaspersz, V. (2013). *All-in-One*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [5] Harrington, H. J. (1991). *Business Process Improvement: The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity, and Competitiveness*. Mew York: McGraw-Hill, Inc.
- [6] ISO. (2008). *Quality Management System*.
- [7] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, CV.